



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON
2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disusun mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 serta upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2022. Selain itu, LKIP disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Sumber, 14 Februari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon



Asep Pamungkas, S.P., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 199303 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LKIP Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2022. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Visi dari Kepala daerah yaitu “*Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman*”. Dinas Pertanian mendukung pencapaian misi keempat yaitu “*Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar Internasional, Nasional, dan Regional yang didukung oleh Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah*”.

Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Cirebon, Dinas Pertanian menetapkan tujuannya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan sasaran meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan). Pada tahun 2022 capaian tujuan dan sasaran adalah 4 dan 483.042,51 ton. Sementara pada tahun 2021 pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB (-) 0,09 dan produksi komoditas unggulan mencapai 479.432,24 ton. Peningkatan pertumbuhan PDRB pada tahun 2022 disebabkan karena peningkatan jumlah produksi di sektor hortikultura dan perkebunan meskipun komoditas tanaman pangan khususnya beras mengalami penurunan jumlah produksi disebabkan karena berkurangnya luas tanam yang signifikan mengakibatkan penurunan jumlah produksi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi komoditas unggulan adalah melakukan optimalisasi dan pemantauan terhadap lahan pangan pertanian berkelanjutan, pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, embung, jalan usaha tani serta meningkatkan pertanian ramah lingkungan disertai dengan peningkatan kompetensi petani melalui pembinaan dan pelatihan.

Penyerapan anggaran belanja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 sebesar Rp 42.138.018.174 dengan realisasi Urusan Pertanian sebesar Rp 11.660.930.970,- (Sebelas milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 13.117.396.100,- (Tiga belas milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) sedangkan Urusan Non Pertanian realisasi sebesar Rp 30.477.087.204,- (Tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 35.448.740.476,- (Tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Sebagian besar sub kegiatan yang dilaksanakan dalam pemanfaatan anggaran untuk mencapai sub output yang telah ditetapkan sesuai dengan harapan (33 sub kegiatan), ada 5 sub kegiatan yang in efisien serta 9 sub kegiatan yang efisien. Melalui LKIP Dinas Pertanian tahun 2022 diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Gambaran Singkat Organisasi	2
4. Dasar Hukum	6
5. Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan dan Sasaran	9
3. Strategi dan Kebijakan	9
4. Program	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	12
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
C. Perbandingan Data Kinerja	13
D. Akuntabilitas Keuangan	16
E. Analisa Efisiensi dan Efektivitas	17
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29

1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja yang dimaksud dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan Renja perangkat daerah, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja perangkat daerah pada tahun mendatang.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (5) dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan perangkat daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan laporan kinerja oleh Dinas Pertanian selaku perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Menyampaikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2022;
- (2) Mengetahui tingkat capaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian selama Tahun 2022;
- (3) Bahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian di Tahun 2022.

Sementara itu tujuan penyusunan LKIP adalah :

- (1). Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- (2). Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

3. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas :

“DINAS PERTANIAN mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Amanat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Dinas Pertanian memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang pertanian;
- b. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- c. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- e. Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian;
- f. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Penyuluhan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

3.2 Sumber Daya Manusia

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sampai akhir Tahun 2022 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan dibantu pegawai kontrak sejumlah 97 orang (data per 31 Desember 2022), dengan rincian PNS berdasarkan golongan terdapat di Tabel 1. Latar belakang pendidikan PNS di lingkungan Dinas Pertanian dari Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Dua (S2) tersaji pada (Tabel 2), dengan rincian jabatan yang tersaji di Tabel 3.

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan golongan di Dinas Pertanian Tahun 2021 dan 2022

No	Golongan	Tahun (Orang)	
		2021	2022
1	I/c	1	0
2	I/d	3	4
Jumlah PNS Gol I:		4	4
1	II/a	29	11
2	II/b	0	18
3	II/c	13	20
4	II/d	7	9
Jumlah PNS Gol II:		49	58
1	III/a	37	29
2	III/b	17	33
3	III/c	15	10
4	III/d	25	34
Jumlah PNS Gol III:		94	106
1	IV/a	18	16
2	IV/b	13	7
3	IV/c	3	2
4	IV/d	0	0
Jumlah PNS Gol IV:		34	25
Jumlah Total		181	193

Tabel 2. Data pegawai berdasarkan jenjang pendidikan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah	
		2021	2022
1	SD	5	4
2	SMP	1	2
3	SMA	44	40
4	D3	16	24
5	D4	2	2
6	S1	99	101
7	S2	14	20
Total		181	193

Tabel 3. Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Struktural:	
	Eselon I	0
	Eselon II	1
	Eselon III	6
	Eselon IV	11
2	Pengawas Bibit Ternak	3

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian	3
4	Pengawas Benih Tanaman	2
5	Pengawas Mutu Pakan	3
6	Penyuluh Pertanian	105
7	Arsiparis	1
8	Bendahara	1
9	Medik Veteriner	8
10	Paramedik Veteriner	13
11	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2
12	Pengadministrasi Umum	6
13	Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	1
14	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	2
15	Pengelola Akuntansi	2
16	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	1
17	Pengelola Keuangan	6
18	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	1
19	Pengelola Rumah Potong Hewan	1
20	Pengelola Teknologi Perbenihan	1
21	Pengolah Data	1
22	Verifikator Keuangan	1
23	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	2
24	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1
25	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1
26	Perencana Ahli Muda	1
27	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	1
28	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	1
29	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3
30	Pengawas Pupuk dan Pestisida	1
JUMLAH TOTAL		193

3.3 Isu Strategis Yang Berpengaruh

Isu strategis pada sektor pertanian di Kabupaten Cirebon adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan petani di antaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP menunjukkan semakin tinggi daya beli dan kesejahteraan petani, dan sebaliknya. NTP dihitung dan disajikan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat Nasional dan Provinsi. Oleh karena itu, penilaian kesejahteraan petani di tingkat Kabupaten/Kota melalui indikator NTP dilakukan dengan membandingkan NTP Provinsi di mana Kabupaten/Kota berada dengan NTP Nasional. NTP Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2022 sebesar 103 sedangkan NTP Nasional sebesar 109. Hal ini menunjukkan rata-rata tingkat daya beli petani di Provinsi Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Cirebon lebih rendah daripada rata-rata nasional.

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Permasalahan pokok merupakan penyebab munculnya isu strategis. Permasalahan pokok yang teridentifikasi sebagai penyebab utama rendahnya tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten

Cirebon adalah rendahnya hasil produksi pertanian yang disebabkan oleh : (1) rendahnya ketersediaan dan belum optimalnya fungsi prasarana pertanian, (2) terbatasnya sarana pertanian yang berkualitas, (3) tingginya urbanisasi sehingga berkurangnya tenaga kerja disektor pertanian, (4) rendahnya adaptasi terhadap teknologi, (5) rendahnya kapasitas pemodal petani, (6) terbatasnya jaringan pemasaran petani, (7) belum optimalnya pertanian ramah lingkungan serta (8) masih rendahnya kelembagaan petani sehingga pengeluaran petani untuk biaya produksi lebih besar dari pendapatan yang diperoleh petani. Namun, regulasi pengendalian biaya produksi pertanian sulit diintervensi karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seperti ketersediaan pupuk bersubsidi yang semakin terbatas, kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan biaya pengoperasian alat dan mesin pertanian, biaya tenaga kerja tinggi akibat rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.

Tabel 4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan	Dari hasil pemantauan pelaksanaan rencana aksi dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui pencapaian target sasaran serta hambatan yang terjadi agar dapat disiapkan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil
2.	Pemantauan terhadap rencana aksi untuk mengendalikan kegiatan	Telah dilakukan pemantauan secara berkala melalui pengumpulan data capaian dari target indikator kinerja

4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2022 adalah:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis dan sejauhmana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi, kendala-kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kelembagaan (Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana), Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategi dan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu juga menyajikan akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi APBD Kabupaten Cirebon termasuk analisis efisiensi dan efektivitas.

BAB IV. PENUTUP

Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Dan Misi

1.1. Visi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Pertanian serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan, maka perlu dirumuskan sebuah visi. Visi Dinas Pertanian ini mengacu pada visi dari Bupati Cirebon, hal ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2024.



1.2. Misi

Sejalan dengan visi, Dinas Pertanian merujuk pada misi keempat Bupati Cirebon untuk merumuskan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visinya yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

Misi keempat Bupati Cirebon

Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah.

2. Tujuan Dan Sasaran

2.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan Dinas Pertanian selaras dengan tujuan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta

manfaat yang akan diberikan oleh perangkat daerah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yaitu Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

2.2. Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pertanian, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis (Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan)	- Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan

2.3 Strategi dan Kebijakan

Proses perencanaan strategis adalah faktor penting dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi diterjemahkan sebagai penyusunan kebijakan dan program agar berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Strategi bisa mengalami perubahan setiap saat sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Strategi tidak bersifat statis melainkan dinamis. Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran dituangkan dalam kebijakan dan program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Jabaran dari strategi adalah kebijakan dan program.

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Dinas Pertanian yang mengacu pada visi misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP)	1	Mendorong rehabilitasi jaringan irigasi tersier
2	Pengembangan sumber daya genetik hewan dan tanaman komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Cirebon	2.1	Subsidi benih unggul untuk petani di wilayah LP2B
		2.2	Revitalisasi mangga gedong gincu
		2.3	Melakukan pengembangan pembibitan ternak dan optimalisasi inseminasi buatan
3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas	3	Meningkatnya indeks penyuluhan

	produk hasil pertanian yang ramah lingkungan		
No	Strategi	No	Arah Kebijakan
4	Memperkuat kerjasama dengan balai penelitian serta pihak akademisi	4	Menyiapkan regulasi untuk mendukung dan mengawasi pola kemitraan
5	Mendorong upaya transfer IPTEK menuju pertanian terpadu dan keberlanjutan	5	Membangun sistem pertanian berbasis teknologi informasi
6	Meningkatkan kordinasi pemanfaatan sumber-sumber air lintas kabupaten	6	Meningkatkan koordinasi untuk
			perbaikan/rehabilitasi/sodetan aliran air/pengerukan sungai dan saluran irigasi untuk berfungsi optimal
7	Mendorong penggunaan benih varietas berumur pendek dan tahan terhadap banjir dan kekeringan	7.1	Menyiapkan subsidi premi asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk petani di wilayah LP2B
		7.2	Menyiapkan embung sebagai tandon air disaat musim penghujan
8	Menguatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan sektor pertanian untuk menyusun dan menerbitkan regulasi pendukung dalam sistem pemasaran hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan	8	Menyiapkan generasi milenial sebagai kader petani milenial
9	Meningkatkan pengawasan peredaran hewan/tanaman dan bahan asal hewan/tanaman	9	Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (Good Agriculture Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices)

2.3. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Program-program yang dilaksanakan di Dinas Pertanian selama Tahun 2022 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
6. Program Perizinan Usaha Pertanian;
7. Program Penyuluhan Pertanian.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

- 3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5) Dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pertanian Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 7. Target Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pertanian dalam Renstra 2021-2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	1,86	2,08	2,31	2,54
1.	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	Ton	506.686	517.162	548.414	588.788

Dokumen rencana strategis disusun untuk tahun 2019-2024 namun dalam pelaksanaannya ada peraturan terbaru yang mengatur mengenai nomenklatur program dan kegiatan yaitu Permendagri nomor 90 tahun 2019 maka dilakukan perubahan renstra 2019-2024. Pada saat penyusunan perubahan renstra asumsi yang digunakan adalah asumsi optimis dimana semua kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi tercukupi sehingga target produksi seperti tertuang pada Tabel 7 namun apabila sarana dan prasarana produksi sesuai dengan kondisi yang ada maka target produksi pada rencana kerja (Renja) setiap tahunnya disesuaikan dengan potensi yang ada seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Target Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pertanian dalam Renja 2021-2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	1,86	2,08	2,31	2,54
1.	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	Ton	480.388	483.953	487.605	491.229

Program/ kegiatan/sub kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian sasaran tahun 2022 tercantum pada lampiran 2.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja menurut Pedoman Penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Eksistensi dari institusi Dinas Pertanian sebagai salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain, diharapkan menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dinas Pertanian telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bapak Bupati Cirebon pada tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Dinas Pertanian berperan aktif dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan mencoba mengimplementasikan dalam Rencana Strategis 2019 – 2024 yaitu dengan menetapkan 1 (satu) sasaran. Target kinerja sasaran yang harus dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon adalah Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan).

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi atau analisis merupakan proses untuk mengurai suatu kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Analisis merupakan kebalikan dari sintesis, yaitu proses untuk menyatukan kondisi, ide, atau objek menjadi sesuatu yang baru secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis kinerja paling tidak dilakukan dengan cara melakukan analisis adanya beda kinerja (*performance gap analysis*), yaitu melihat beda (*gap*) antara yang sudah direncanakan dengan realisasinya atau kenyataannya. Jika terdapat gap yang besar, maka perlu diteliti sebab-sebabnya berikut berbagai informasi kendala dan hambatan termasuk usulan tindakan-tindakan apa yang

diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Keseluruhan hasil analisis kinerja selanjutnya dituangkan dalam pelaporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 10. Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Persentase (%)
1	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	2,08	4	192
1.1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan	ton	483.953	483.042	99,8

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian mencapai 192% dari target 2,08% tercapai 4% hal ini didukung dengan pencapaian produksi yang ditargetkan Dinas Pertanian di Tahun 2022 dari komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan sejumlah 483.953 ton, dalam capaiannya selama tahun 2022 tercapai sebesar 483.042,51 ton atau (99,80%) termasuk kedalam kategori “*sangat tinggi*” dari kriteria penilaian realisasi kinerja (Permendagri 86 Tahun 2017) dengan rincian produksi beras 367.205 ton, bawang merah 39.969, 40 ton, cabe besar 5.851, 40 ton, mangga 37.101,90 ton, gula 20.555,84 ton, daging domba 2.153,35 ton, daging unggas lokal 1.934,32 ton

C. PERBANDINGAN DATA KINERJA

Target dan capaian dari kinerja tujuan serta sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon di Tahun 2021 dan 2022 ditampilkan pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2021 dan 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	2021			2022		
			Target	Capaian	Persen	Target	Capaian	Persen
1	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian(%)	1,86	-0,09	-4,8	2,08	4	192
1.1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan (Ton)	480.388	479.432	99,8	483.953	483.042	99.8

Data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor pertanian tahun 2022 relatif tinggi (4%) dibandingkan tahun 2021 yang berada pada posisi rendah (-0,09). Perhitungan PDRB dilakukan dan dipublikasikan oleh BPS dan data PDRB yang dipublikasikan tahun 2021 adalah PDRB sektor pertanian, kehutanan serta perikanan. Tahun 2021 pada posisi minus karena ada sektor lain yang produksi komoditasnya menurun, sementara produksi komoditas unggulan relative tinggi tergambar dari capaian produksi masing-masing komoditas.

Produksi komoditas unggulan tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah 483.042,51 ton dibandingkan dengan produksi komoditas unggulan pada tahun 2021 dengan jumlah 479.432,24 ton sehingga pertumbuhan PRDB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan naik (4%). Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian terhadap pencapaian target produksi khususnya produksi komoditas unggulan maka perlu diuraikan jumlah produksi dari masing-masing komoditas unggulan tahun 2021-2022.

Tabel 12. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2021 dan 2022

No	Produksi Komoditas	2021			2022		
		Target	Capaian	Persen	Target	Capaian	Persen
1	Sektor tanaman pangan (Beras)	356.942	369.547	103,5	359.965	368.503	102,4
2	Sektor tanaman hortikultura (Bawang Merah)	36.077	33.614	93,17	36.221	40.079	110,6
3	Sektor tanaman hortikultura (Cabai Besar)	6.235	5.564	89,24	6.260	5.882	93,96
4	Sektor tanaman hortikultura (Mangga)	56.160	51.041	90,88	56.440	43.935	77,84
5	Sektor tanaman perkebunan (Gula,)	21.565	16.130	74,80	21.065	20.555,84	95,14
6	Sektor peternakan (Daging Domba)	1.623	1.682,85	103,4	1.649	2.153,35	130,0
7	Sektor peternakan (Daging Unggas Lokal)	1.786	1.853,39	103,4	1.813	1.934,32	106,0
	Jumlah	480.388	479.432,24	99.8	483.953	483.042,51	99.8

Dari tujuh komoditas unggulan tersebut hanya padi dan mangga saja yang produksinya mengalami penurunan sementara untuk produksi bawang merah, cabe besar, gula, daging domba dan daging unggas mengalami kenaikan, berikut disampaikan hasil Analisa data produksi:

1. Pada sektor tanaman pangan khususnya komoditas beras, terlihat ada penurunan produksi di tahun 2022 dari tahun 2021 karena ada penurunan luas tanam 1,25% dari 92.539 Ha menjadi 91.381%. Penurunan luas tanam secara signifikan akan mengurangi jumlah produksi. Penyebab berkurangnya luas tanam adalah (1) Terjadinya alih fungsi lahan (2) terjadi alih komoditas serta (3) terjadinya kemarau sehingga ada penundaan waktu tanam.
2. Sektor hortikultura produksinya rata-rata menunjukkan peningkatan hasil kecuali mangga:
 - Pada komoditas bawang merah produksinya mencapai 40.079 ton di tahun 2022 lebih besar dari hasil produksi di tahun 2021 (33.614 ton). Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan luas tanam sebanyak 11,16% dari 3.388 Ha menjadi 3.766 Ha. Hal ini disebabkan akibat harga jual bawang merah semakin baik maka meningkatkan motivasi petani untuk menanam bawang merah;
 - Pada komoditas cabai besar produksinya menunjukkan peningkatan hasil di tahun 2022 sebesar 5.882 ton sedangkan di tahun 2021 hanya 5.564 ton. Hal ini bukan akibat bertambahnya luas tanam (luas tanam 2021 adalah 602 Ha dan luas tanam 2022 adalah 600 Ha) namun akibat adanya sisa tanaman pada tahun 2021 yang waktu panennya masuk ke tahun 2022;

- Pada komoditas mangga terjadi penurunan yang cukup tinggi dari hasil produksi 51.041 ton di tahun 2021 menjadi 43.935 ton pada tahun 2022. Menurunnya produksi mangga dipengaruhi oleh berkurangnya tanaman produktif sebanyak 2,28% dari 933.847 pohon mangga tersisa 912.601 pohon mangga.
4. Sektor tanaman perkebunan ditunjukkan dengan produksi gula yang meningkat menjadi 20.555,84 ton di tahun 2022, dari 16.130 ton pada tahun 2021. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya minat petani melakukan budidaya tebu seiring kabar PG Sindang Laut akan beroperasi kembali di musim giling 2023. Hal ini ditandai dengan kenaikan luas areal tebu dalam 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 sekitar 300-400 Ha.
 5. Pada sektor peternakan rata-rata produksi daging mengalami peningkatan:
 - Capaian pada daging unggas lokal sebesar 1.853,39 ton (tahun 2021) menjadi 1.934,32 ton pada tahun 2022 disebabkan akibat peningkatan permintaan daging unggas lokal sehingga memotivasi peternak untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga meningkatkan budidaya unggas lokal.
 - Pada daging domba produksinya mengalami peningkatan yaitu dari 1.682,85 ton di tahun 2021 menjadi 2.153,35 ton pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang biasanya memotong sapi, beralih memotong domba pada saat hari raya Idul Adha tahun 2022 akibat adanya wabah penyakit mulut dan kuku pada pertengahan tahun 2022 sehingga terjadi peningkatan populasi pemotongan ternak domba dibandingkan ternak besar.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2022 Terhadap Target Renstra

No	Tujuan/Sasaran	2022			2024 (Target Renstra)		
		Target	Capaian	Persen	Target	Capaian	Persen
	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	2,08	4	192	2,54	4	157
	Meningkatnya produksi sektor pertanian :						
1	Sektor tanaman pangan (Beras)	359.965	368.503	102,4	463.689	368.503	79,47
2	Sektor tanaman hortikultura (Bawang Merah)	36.221	40.079	110,6	36.511	40.079	101
3	Sektor tanaman hortikultura (Cabai Besar)	6.260	5.882	93,96	6.310	5.882	93,21
4	Sektor tanaman hortikultura (Mangga)	56.440	43.935	77,84	57.006	43.935	77,07
5	Sektor tanaman perkebunan (Gula,)	21.065	20.555,84	95,14	21.692	20.555,84	94,76
6	Sektor peternakan (Daging Domba)	1.649	2.153,35	130,0	1.702	2.153,35	126,5
7	Sektor peternakan (Daging Unggas Lokal)	1.813	1.934,32	106,0	1.868	1.934,32	103,6
	Jumlah	483.953	483.042,51	99.8	588.788	483.042,51	82,04

Pada tabel 13 terlihat bahwa target dan capaian tujuan serta sasaran tahun 2022 dibandingkan terhadap target dan capaian tujuan dan sasaran Tahun 2024 masih banyak yang di bawah 100% khususnya untuk produksi komoditas tanaman pangan (beras), hortikultura (bawang merah, cabe

besar, mangga) dan perkebunan (gula). Tantangan yang dihadapi sektor pertanian dalam upaya pencapaian target saat ini adalah :

- (1) rendahnya ketersediaan dan belum optimalnya fungsi prasarana pertanian;
jumlah prasarana pendukung produksi pertanian ketersediaannya belum mencukupi, dari areal 52.622 Ha yang ditargetkan memperoleh manfaat jaringan irigasi usaha tani baru 40.947 Ha yang sudah terpenuhi dan dari 524 lokasi yang ditargetkan pembangunan jalan usaha tani baru 177 yang sudah terpenuhi, sehingga masih cukup banyak prasarana yang perlu ditambahkan ketersediaannya.
- (2) terbatasnya sarana pertanian yang berkualitas;
pemanfaatan sarana pertanian yang berkualitas masih terbatas karena ketersediaan pupuk baru tercapai 0,42% dari yang diperlukan, ketersediaan pompa air baru tercapai 0,62% dari yang dibutuhkan, ketersediaan lahan hanya tersedia 0,93% dari yang sudah ditargetkan untuk pencapaian produksi.
- (3) tingginya urbanisasi sehingga berkurangnya tenaga kerja disektor pertanian;
generasi muda lebih memilih untuk mencari pekerjaan di sektor jasa sehingga dalam proses kaderisasi tenaga kerja disektor pertanian sangat rendah (menurut Kabupaten Cirebon Dalam Angka, BPS, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja disektor pertanian sekitar 92.825 orang, bekerja disektor industry 348.526 orang dan bekerja disektor jasa sekitar 528.911 orang).
- (4) rendahnya adaptasi terhadap teknologi,
usaha pertanian dari hulu sampai hilir masih banyak yang belum adaptif terhadap teknologi mengingat generasi milenial merupakan generasi yang adaptif terhadap teknologi dan saat ini sebagian besar masih sebagai pelaku usaha disektor jasa dan industry.
- (5) rendahnya kapasitas pemodalan petani,
seperti telah dijelaskan diawal bahwa nilai tukar petani (NTP) di provinsi Jawa Barat masih lebih rendah dari NTP nasional, semakin rendah NTP petani maka pendapatan petani rendah sehingga untuk kebutuhan permodalan petani bergantung kepada tengkulak.
- (6) terbatasnya jaringan pemasaran petani,
karena petani untuk permodalan sudah bergantung kepada tengkulak maka setelah panen hasil produksi langsung dijual kepada tengkulak dengan harga yang tidak layak.
- (7) belum optimalnya pertanian ramah lingkungan;
pertanian selama ini bergantung pada pupuk kimia untuk memacu produksi namun efek yang diterima dari hal tersebut adalah tanah menjadi tidak subur dan semakin lama produktivitasnya menurun. Saat ini dengan berkurangnya kuota pupuk kimia menyebabkan petani kesulitan untuk memperoleh pupuk sehingga petani perlu dimotivasi untuk Kembali mamfaatkan pupuk organic.
- (8) masih rendahnya kelembagaan petani;
kelompok tani fungsinya baru sampai tahap organisasi yang bermanfaat untuk menerima pembinaan sehingga agar kelembagaannya dapat berfungsi lebih baik maka perlu perbaikan manajemen serta karakter petani untuk menjadi petani yang maju, mandiri dan modern.

Menimbang tantangan yang dihadapi, maka untuk mencapai target produksi sesuai renstra 2019-2024, mendukung pencapaian target produksi tahun 2024, perlu diperhatikan beberapa hal :

- 1) Dalam rangka mendukung peningkatan produksi beras maka yang harus dilakukan adalah adanya kebijakan pemerintah daerah memberi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), peningkatan indeks pertanaman yang di dukung melalui pembangunan atau perbaikan irigasi, embung dan jalan usaha tani, pengembangan budidaya padi ramah lingkungan serta peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan dan pemanfaatan teknologi;
- 2) Mendukung peningkatan produksi hortikultura (bawang merah, cabe besar dan manga) maka perlu dilakukan penambahan luas tanam, pemanfaatan benih varietas unggul, pengendalian OPT serta meningkatkan budidaya tanaman hortikultura yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas penyuluhan, khusus untuk tanaman mangga perlu dilakukan peremajaan pohon mangga agar populasi mangga di Kabupaten Cirebon dapat terjaga jumlahnya;
- 3) Sementara untuk mendukung peningkatan produksi gula maka perlu dijaga luas tanam serta produktivitas tanaman tebu dengan memanfaatkan teknologi tepat guna melalui peningkatan intensifikasi produksi tebu serta peningkatan kapasitas petani tebu di Kabupaten Cirebon.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Laporan realisasi anggaran (LRA) menurut pendapatan dan belanja pada Dinas Pertanian tahun anggaran 2022 dilampirkan pada dokumen LKIP ini dengan ringkasan pendapatan dan belanja daerah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Kode Rek	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	457.223.400	410.321.100	89,74
5.	Belanja Daerah	48.566.136.576	45.313.169.571	93,30
5.1	Belanja Operasi	48.540.209.576	45.287.310.571	93,30
5.1.01	Belanja Pegawai	32.932.434.000	31.158.401.555	94,61
5.1.02	Belanja Barang Jasa	8.174.025.576	7.146.409.016	87,43
5.1.05	Belanja Hibah	7.433.750.000	6.982.500.000	93,93
5.2	Belanja Modal	25.927.000	25.859.000	99,74

Realisasi pendapatan asli daerah melalui retribusi pada tahun 2022 mencapai 89,74% hal ini terjadi akibat target pemotongan hewan di rumah potong hewan ruminansia yang berlokasi di Desa Batambat Tengah Tani tidak dapat mencapai target akibat kondisinya yang sudah tidak layak sehingga menyebabkan para jagal melakukan pemotongan hewan di tempat pemotongan hewan milik masyarakat. Namun meskipun demikian untuk retribusi dari pasar (kios di pasar hewan) dan penjualan produksi usaha daerah (perbenihan) mencapai lebih dari 100%.

Sementara belanja daerah untuk belanja operasi mencapai 93,30% dan belanja modal mencapai 99,74%. Belanja operasi berupa belanja pegawai hanya mencapai 94,61% karena ada anggaran belanja gaji yang anggarannya masih tersisa berkaitan dengan tersisanya gaji bagi

pegawai yang meninggal dan pensiun. Belanja barang jasa hanya terealisasi 87,43% secara umum akibat ada beberapa pekerjaan yang standar harganya lebih tinggi dari harga pasar sehingga ada efisiensi. Sementara itu untuk belanja hibah hanya mencapai 93,30% secara umum disebabkan oleh adanya pekerjaan yang tidak terlaksana karena pada saat kegiatannya akan dilaksanakan ada persyaratan yang tidak sesuai. Untuk penjelasan alasan pekerjaan tidak dapat terlaksana tertuang pada lampiran 2.

E. ANALISA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian output yang lebih besar daripada realisasi keuangan dan atau capaian input mencapai di atas seratus persen menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *efisien*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil daripada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *in-efisien*. Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *sesuai harapan*.

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya ada 2 urusan, yaitu:

A. Urusan Pertanian, dengan 6 program, 13 kegiatan, dan 22 sub kegiatan

Pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp 13.117.396.100 dan terealisasi sebesar Rp 11.660.930.970 atau sebesar 88,90 % dengan rincian di bawah ini.

I. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 173.195.400,- dan terealisasi Rp.159.867.600,- masih sisa Rp. 13.327.800,- atau tercapai sebesar 92,3%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, adapun sub kegiatannya yaitu:

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.789.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.027.980,- atau tercapai sebesar 87,74%. Sub kegiatan ini termasuk in efisien untuk mencapai indikator sebagai berikut:
 - Jumlah alokasi pupuk yang terawasi perolehan dan pemanfaatannya, target 80.183 ton capaian 55.191 ton (69%).
 - Jumlah petani yang tervalidasi kebutuhan dan penggunaan pupuknya, target 74.747 orang capaian 74.747 orang (100%)
- b. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.406.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.839.620,- atau tercapai sebesar 96,99%. Sub kegiatan ini efisien untuk mencapai indikator sebagai berikut:
 - Jumlah gabungan kelompok petani yang mendapat pendampingan menjadi unit pengelola jasa alsintan (UPJA), target 50 gapoktan capaian 50 gapoktan (100%).

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 8.074.909.600,- dan terealisasi sebesar Rp.7.488.019.480,- sisa sebesar Rp. 586.890.120,- atau tercapai sebesar 92,73%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Pengembangan Prasarana Pertanian, adapun sub kegiatannya yaitu:

Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.806.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.355.040,- atau tercapai sebesar 62,46%. Sub kegiatan ini efisien dilaksanakan untuk mendapat indikator sebagai berikut:

- Jumlah lahan potensial menjadi (LP2B) yang diupdate secara berkala target 40.000 Ha capaian 40.000 Ha (100%)

2) Pembangunan Prasarana Pertanian, adapun sub kegiatannya yaitu:

a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.476.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.358.780.000,- atau tercapai sebesar 95,26%. Sub kegiatan ini termasuk in efisien untuk mendapatkan indikator sebagai berikut:

- Jumlah jaringan irigasi air tanah dangkal yang dibangun, target 7 unit capaian 7 unit (100%)
- Jumlah jaringan irigasi air tanah dalam yang dibangun, target 4 unit capaian 4 unit (100%)
- Jumlah jaringan irigasi tersier yang direhab/dibangun, target 3 unit capaian 2 unit (66,7%)

b. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.350.900.000,- dan terealisasi Rp. 4.904.430.000,- atau tercapai sebesar 91,66%. Sub kegiatan ini termasuk in efisien, untuk mendapat indikator sub output sebagai berikut:

- Jumlah JUT yang dibangun, target 16 unit capaian 12 unit (75%)
- Jumlah jalan produksi yang dibangun, target 25 unit capaian 25 unit (100%)

c. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.063.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 187.454.440,- atau tercapai sebesar 99,68%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan untuk mendapat indikator sub output sebagai berikut:

- Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dikelola untuk taman teknologi pertanian (TTP), target 1 unit capaian 1 unit (100%)

II. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 549.499.850,- dan terealisasi sebesar Rp.534.551.110,- sisa sebesar Rp. 14.948.740,- atau tercapai sebesar 97,3%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu:

Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.150.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 418.285.460,- atau tercapai sebesar 99,32%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan untuk mendapat indikator sub output sebagai berikut:

- Jumlah hijauan pakan ternak untuk pengembangan dan pembibitan ternak, target 189.800 Kg capaian 189.800 Kg (100%)
- Jumlah pakan konsentrat sapi untuk pengembangan dan pembibitan ternak, target 14.600 Kg capaian 14.600 Kg (100%)
- Jumlah obat-obatan ternak untuk pengembangan dan pembibitan ternak, target 1 paket capaian 1 paket (100%)
- Jumlah pakan unggas untuk pengembangan dan pembibitan ternak, target 11.680 Kg capaian 11.679 Kg (100%)
- Jumlah biaya pendukung operasional, target 1 tahun capaian 1 tahun (100%)

- b. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu:

Penjaminan peredaran benih/bibit ternak, dengan alokasi anggaran Rp. 128.349.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 116.265.650,- atau tercapai sebesar 90,59%.

Sub kegiatan ini efisien untuk mendapat indikator sub output sebagai berikut:

- Jumlah semen beku yang disediakan, target 1.250 dosis capaian 1.250 dosis (100%)
- Jumlah N2 cair yang disediakan, target 1.740 liter capaian 1.740 liter (100%)
- Jumlah saran IB yang disediakan, target 1 paket capaian 1 paket (100%)
- Jumlah biaya pendukung operasional, target 1 tahun capaian 1 tahun (100%)
- Jumlah bibit domba yang terawasi jenis dan peredarannya, target 301.455 ekor capaian 307.432 ekor (101%)
- Jumlah bibit unggas lokal yang terawasi jenis dan peredarannya, target 2.178.963 ekor capaian 2.181.870 ekor (100%)

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 557.513.450,- dan terealisasi sebesar Rp.539.731.410,- sisa sebesar Rp. 17.782.040,- atau tercapai sebesar 96,8%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan prasarana pertanian, adapun sub kegiatannya yaitu:

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 557.513.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 539.731.410,- atau tercapai sebesar 96,8%. Sub kegiatan ini efisien untuk mendapat indikator sub output sebagai berikut:

- Jumlah biaya pendukung operasional RPU target 1 tahun capaian 1 tahun (100%)
- Jumlah sarana prasarana RPU, target 2 paket capaian 2 paket (100%)
- Jumlah biaya pendukung operasional RPH, target 1 tahun capaian 1 tahun (100%)
- Jumlah sarana prasarana RPH yang disediakan, target 3 unit capaian 3 unit (100%)

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp. 1.468.015.300,- dan terealisasi sebesar Rp.680.990.480,- sisa sebesar Rp. 787.024.820,- atau tercapai sebesar 46,39%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu: Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.265.314.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 481.658.730,- atau tercapai sebesar 38,07%.

Sub kegiatan ini efisien untuk mendapat indikator sub output sebagai berikut:

- Jumlah pengobatan hewan kecil, target 7533 ekor capaian 4910 ekor (65%)
- Jumlah pengobatan hewan besar, target 1360 ekor capaian 1550 ekor (114%)
- Jumlah pengobatan unggas, target 4000 ekor capaian 6000 ekor (150%)
- Jumlah vaksinasi rabies, target 330 ekor capaian 330 ekor (100%)
- Jumlah vaksinasi AI/ND, target 15600 ekor capaian 15600 ekor (100%)
- Jumlah biaya operasional pelayanan keswan target 1 tahun capaian 1,08 tahun)

- 2) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu: Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.891.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.000.000,- atau tercapai sebesar 97,10%.

Sub kegiatan ini efisien untuk mendapat indikator sub output : Jumlah pelayanan jasa medik veteriner, target 12 laporan capaian 12 laporan (100%).

- 3) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, adapun sub kegiatannya yaitu: Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.809.450,- dan terealisasi Rp. 102.331.750,- atau tercapai sebesar 99,54%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan untuk mendapat indikator sub output:

- Jumlah pengawasan kesehatan hewan kurban target 40 kecamatan capaian 40 kecamatan (100%)
- Jumlah pengawasan pemotongan hewan kurban 40 Kecamatan capaian 40 kecamatan (100%)
- Jumlah pengawasan perdagangan hewan dan BAH, target 5 pasar hewan capaian 5 pasar hewan (100%)

- Jumlah pengawasan lalu lintas ternak antar daerah, target 1 pasar hewan capaian 1 pasar hewan (100%)
- Jumlah pengambilan dan pengujian daging, target 250 sampel capaian 250 sampel (100%)
- Jumlah pengawasan TPU/TPH, target 13 unit capaian 13 unit (100%)

III. Bidang Tanaman Pangan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 170.346.000,- dan terealisasi sebesar Rp.161.560.900,- sisa Rp. 8.785.100,- atau tercapai sebesar 94,8%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu: Pemanfaatan SDG hewan/tanaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.346.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 161.560.900,- atau tercapai sebesar 94,84%.

Sub kegiatan ini efisien untuk mendapat indikator sub output sebagai berikut:

- Jumlah benih padi unggulan dari hasil penangkaran, target 35 ton capaian 41,58 ton (119%)
- Jumlah lahan pertanian milik pemda yang dikelola untuk penangkaran benih padi unggulan sebagai insentif petani LP2B target 10 Ha capaian 26 Ha (260%)
- Jumlah benih padi yang terawasi mutu dan peredarannya, target 2.369 ton capaian 2.369,87 ton (100%)

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 96.303.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.303.800,- atau tercapai sebesar 100 %.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan prasarana pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.303.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.303.800,- atau tercapai sebesar 100 %, adapun sub kegiatannya yaitu:

- a. Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B alokasi anggaran Rp 36.248.000,- dan terealisasi Rp 36.248.000,- (100%)

Sub kegiatan ini termasuk in efisien untuk mendapat indikator sub output : Jumlah lahan pertanian yang akan difasilitasi asuransi oleh pemerintah daerah, target 12.500 Ha capaian 11.500 Ha (94%)

- b. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dengan alokasi anggaran Rp 60.055.800,- dan terealisasi Rp 60.055.800,- (100%)

Sub kegiatan ini sesuai harapan untuk mendapat indikator: Jumlah advokasi permodalan dan pemasaran hasil produksi petani, target 2 dokumen capaian 2 dokumen (100%)

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

sebesar Rp. 87.263.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.263.100,- atau tercapai sebesar 100 %.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 87.263.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.263.100,- atau tercapai sebesar 100 %, adapun sub kegiatannya yaitu: Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Sub kegiatan ini sesuai harapan untuk mendapat indikator sub output: Jumlah kelompok tani yang mengikuti sekolah lapang pengendalian OPT dan iklim, target 40 kelompok capaian 40 kelompok (100%).

IV. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatannya yaitu: Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 283.416.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 280.490.690,- atau tercapai sebesar 98,97%.

Sub kegiatan ini efisien dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

- Jumlah bibit tanaman/buah-buahan dan toga yang difailitasi untuk masyarakat, target 1.920 batang capaian 1.920 batang (100%)
- Jumlah bibit tebu yang terawasi mutu dan peredarannya, target 38.756 ton capaian 9.048,64 ton (23,3%)
- Jumlah tanaman mangga yang terawasi mutu dan peredarannya, target 967.106 pohon capaian 967.106 pohon (100%)
- Jumlah benih cabe merah besar yang terawasi mutu dan peredarannya, target 210 kg capaian 480 kg (228%)
- Jumlah benih bawang merah yang terawasi mutu dan peredarannya, target 5.516 ton capaian 5.649 ton (102,4)
- Jumlah peraturan daerah/fasilitasi lainnya terkait peningkatan kualitas SDG tanaman, target 1 dok capaian 1 dok (100%) .

2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian melalui kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.471.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 84.856.680,- atau tercapai sebesar 82,01 %, adapun sub kegiatannya yaitu: Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

Sub kegiatan ini efisien dilaksanakan untuk mendapat indikator sub output : Jumlah sarana pengendalian ramah lingkungan (buah-buahan dan sayuran), target 1 paket capaian 1 paket (100%).

3. Program Perizinan Usaha Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Perizinan Usaha Pertanian melalui kegiatan: Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.268.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.102.120,- atau tercapai sebesar 99,80 %, adapun sub kegiatannya yaitu: Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian.

Sub kegiatan ini termasuk sesuai harapan untuk mendapat indikator sub output : Jumlah kelompok yang lahan usaha/kebunnya diregistrasi, target 50 unit capaian 50 unit (100%).

V. Bidang Penyuluhan Pertanian

1. Program Penyuluhan Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 1.470.193.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.464.193.600,- sisa sebesar Rp. 6.000.000,- atau tercapai sebesar 99,59%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: Pelaksanaan penyuluhan pertanian, adapun sub kegiatannya yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 411.806.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 411.806.600,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan dilaksanakan untuk mendapat indikator sub output sebagai berikut:

- Jumlah pemagangan, target 30 orang capaian 30 orang (100%)
 - Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya, target 16 unit capaian 16 unit (100%)
 - Jumlah penyuluh lapangan yang mengikuti pelatihan teknis, target 260 orang capaian 260 orang (100%)
 - Jumlah penyusunan dan pengesahan program, database, impact point Tk kabupaten, target 50 orang capaian 50 orang (100%)
 - Jumlah tenaga teknis target 1 orang capaian 1 orang (100%)
- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 989.022.500,- dan terealisasi Rp. 983.022.500,- atau tercapai sebesar 99,39%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan dilaksanakan untuk mendapat indikator sub output :

- Jumlah pameran/pasar tani, target 2 kali capaian 2 kali (100%)
- Jumlah penilaian kelas kelompok, target 1 Kabupaten capaian 1 Kabupaten (100%)
- Jumlah pertemuan KWT, target 40 orang capaian 40 orang (100%)
- Jumlah pertemuan KTNA, target 30 orang capaian 30 orang (100%)
- Jumlah forum kordinasi komisi penyuluhan, target 50 orang capaian 50 orang (100%)

- Jumlah penyelenggaraan lomba petani, kelompok tani, gapoktan/KEP, THL, penyuluh PNS dan swadaya, penyuluh pendamping, petani milenial, BPP berprestasi Tk Kab, Prov, dan Nasional; target 1 kali capaian 1 kali (100%)
 - Jumlah rembug tani, target 40 desa capaian 40 desa (100%)
 - Jumlah taruna tani yang terbentuk, target 57 kelas capaian 57 kelas (100%)
- c. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.364.500,- dan terealisasi Rp. 69.364.500,- atau tercapai sebesar 100%.
- Sub kegiatan ini sesuai harapan dilaksanakan untuk mendapat indikator sub output:
- Jumlah pelayanan klinik agribisnis, target 90 orang capaian 90 orang (100%)
 - Jumlah uji coba paket teknologi, target 4 lokasi capaian 4 lokasi (100%).

B. Urusan Non Pertanian

Pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan 1 Program, 7 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp 35.448.740.476 dan terealisasi sebesar Rp 31,981.799.004 atau sebesar 85,98 % dengan rincian di bawah ini.

I. Sekretariat Dinas Pertanian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 35.448.740.476,- dan terealisasi sebesar Rp.31.981.799.004,- sisa sebesar Rp. 3.466.941.472,- atau tercapai sebesar 90,22%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 298.967.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 297.120.490,- atau tercapai sebesar 99,38%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, target 1 dokumen capaian 1 dokumen (100%)
 - Jumlah dokumen statistik pertanian, target 12 dokumen capaian 12 dokumen (100%)
 - Jumlah aplikasi pendukung perencanaan yang dikelola, target 2 aplikasicapaian (2 aplikasi)
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.165.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.165.900,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah dokumen RKA-SKPD, target 1 dokumen capaian 1 dokumen (100%)
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.399.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.399.800,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, target 1 dokumen capaian 1 dokumen

- d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.345.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.345.500,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah DPA-SKPD, target 1 dokumen capaian 1 dokumen (100%)

- e. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.275.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.275.800,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah DPA perubahan - SKPD, target 1 dokumen capaian 1 dokumen (100%)

- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.956.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.956.600,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah, target 4 dokumen capaian 4 dokumen (100%)

- g. Evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.452.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.402.920,- atau tercapai sebesar 99,87%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan negara dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, target 12 dokumen capaian 12 dokumen (100%)

2) Administrasi keuangan perangkat daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 32.932.434.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.482.061.958,- atau tercapai sebesar 89,52%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah pegawai ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya setiap bulan, target 183 pegawai capaian 183 pegawai.

- b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.777.000,- dan terealisasi Rp. 3.633.000,- atau tercapai sebesar 96,19%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah laporan keuangan akhir tahun, target 1 dokumen capaian 1 dokumen

- c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.150.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.950.940,- atau tercapai sebesar 99,21%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah laporan keuangan semesteran, target 2 dokumen capaian 2 dokumen

3) Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:

Pengamanan barang milik daerah SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 59.730.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.674.440,- atau tercapai sebesar 99,91%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah laporan aset SKPD, target 12 dokumen capaian 12 dokumen (100%).

4) Administrasi kepegawaian perangkat daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:

Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.806.620,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.724.000,- atau tercapai sebesar 99,75%.

Sub kegiatan ini sesuai harapan dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya, target 108 stel capaian 108 stel (100%).

5) Administrasi umum perangkat daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.802.200,- dan terealisasi Rp. 3.802.200,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah peralatan listrik, target 5 jenis capaian 5 jenis (100%).

b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.421.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.421.000,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah peralatan, perlengkapan kantor dan rumah dinas, target 3 jenis capaian 3 jenis (100%)

c. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan anggaran Rp. 26.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.840.000,- atau tercapai sebesar 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman rapat/tamu yang difasilitasi, target 11 bulan capaian 11 bulan (100%),

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.499.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.499.900,- atau tercapai sebesar 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah barang cetakan dan penggandaan (karcis, STS, kartu kendali, kartu disposisi, amplop dinas/bupati/setda, map dinas, spanduk, target 10 jenis capaian 10 jenis (100%).

e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.320.000,- atau tercapai sebesar 98,84%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah surat kabar/majalah yang menjadi bahan bacaan, target 2 jenis capaian 2 jenis (100%).

f. Penyediaan bahan/material, dengan alokasi anggaran Rp. 47.046.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.046.600,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah ATK dalam 1 tahun, target 31 jenis capaian 31 jenis (100%).

g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.016.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 63.016.200,- atau tercapai sebesar 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah perjalanan ke dalam dan luar daerah, target 12 bulan capaian 12 bulan (100%).

6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, adapun sub kegiatannya yaitu: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 305.759.706,- dan terealisasi sebesar Rp. 299.229.956,- atau tercapai sebesar 97,86%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah biaya rekening telpon, air, listrik dan internet yang difasilitasi, target 12 bulan capaian 12 bulan (100%).

7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 735.748.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 730.655.000,- atau tercapai sebesar 99,31%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan untuk mendapatkan indikator sebagai berikut:

Jumlah kendaraan bermotor yang difasilitasi pemeliharaannya, target 248 unit capaian 248 unit (100%).

b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.643.400,- atau tercapai sebesar 99,14%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui sesuai harapan indikator sebagai berikut:

Jumlah pajak (STNK) kendaraan dinas, target 248 unit capaian 189 unit (76%).

c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.592.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.477.000,- atau tercapai sebesar 99,68%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, target 4 jenis capaian 4 jenis (100%).

d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 703.140.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 701.194.000,- atau tercapai sebesar 99,72%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara (gedung UPT, gedung BPP, gedung TTP Sedong dan gedung dinas), target 23 unit capaian 23 unit (100%).

- e. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.942.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.942.400,- atau tercapai sebesar 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai harapan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah bangunan rumah dinas yang difasilitasi pemeliharaannya, target 2 unit capaian 2 unit (100%).

A. KESIMPULAN

Dinas Pertanian memiliki 1 sasaran strategis yaitu meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB, dan dalam melaksanakan tugasnya terbagi kedalam 2 (dua) urusan yaitu non urusan pertanian dan urusan pertanian. Pada pelaksanaan non urusan pertanian di tahun anggaran 2022 melaksanakan 1 program, 7 kegiatan, dan 25 sub kegiatan. Sedangkan pada urusan pertanian melaksanakan 12 program, 16 kegiatan, dan 22 sub kegiatan.

Dinas Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama Tahun 2022 dapat mencapai produksi 99,8% dari jumlah produksi yang sudah ditargetkan. Keberhasilan pencapaian target produksi Dinas Pertanian berpengaruh terhadap capaian PDRB di sektor pertanian sebagai tujuan yang pertumbuhannya mencapai 4%.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian menghadapi beberapa masalah diantaranya adalah: (1) rendahnya ketersediaan dan belum optimalnya fungsi prasarana pertanian, (2) terbatasnya sarana pertanian yang berkualitas, (3) tingginya urbanisasi sehingga berkurangnya tenaga kerja disektor pertanian, (4) rendahnya adaptasi terhadap teknologi, (5) rendahnya kapasitas pemodalannya petani, (6) terbatasnya jaringan pemasaran petani, (7) belum optimalnya pertanian ramah lingkungan serta (8) masih rendahnya kelembagaan petani sehingga pengeluaran petani untuk biaya produksi lebih besar dari pendapatan yang diperoleh petani.

B. SARAN

Untuk mengatasi tantangan yang ada disektor pertanian perlu ditingkatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan intensifikasi dan mekanisasi pertanian serta meningkatkan inovasi dalam usaha pertanian. Sementara untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, pelaksanaan program strategis pemerintah daerah di Dinas Pertanian perlu dioptimalkan upaya perbenihan, inventarisasi pembangunan jalan usaha tani dan irigasi usaha tani, revitalisasi agribisnis mangga gedong gincu, penyediaan demplot sebagai sarana pembelajaran, pembangunan rumah potong hewan dan optimalisasi taman teknologi pertanian Sedong sebagai sentra pelatihan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami susun, mudah-mudahan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan pengalaman yang baik sehingga dapat mengambil manfaatnya dan dapat menyusun kegiatan yang akan datang lebih baik lagi.